



EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA TANIMULYA KECAMATAN NGAMPRAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

Febby Nur Annissa¹⁾, Toto Kushartono²⁾, Lukman Munawar Fauzi³⁾

1,2,3) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini berjudul "Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat". Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tanimulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, serta untuk mengetahui sejauh mana program ini berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori evaluasi menurut William N. Dunn yang mencakup dimensi Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tanimulya sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan tujuan awal program, yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup peserta PKH melalui peningkatan kesejahteraan keluarga penerima manfaat, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Program ini juga telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan partisipasi keluarga dalam sektor pendidikan dan akses kesehatan, meskipun terdapat beberapa tantangan terkait distribusi bantuan yang perlu diperbaiki, seperti ketepatan waktu penyaluran dan kejelasan informasi kepada penerima manfaat. Secara keseluruhan, PKH di Desa Tanimulya telah cukup efektif dalam mencapai tujuannya, namun masih perlu adanya peningkatan pada aspek efisiensi dan kecukupan bantuan agar manfaatnya lebih merata dan tepat sasaran.

Kata Kunci: Evaluasi, Program Keluarga Harapan, Desa Tanimulya, Kesejahteraan Keluarga.

Abstract

This study is titled "Evaluation of the Implementation of the Family Hope Program (PKH) in Tanimulya Village, Ngamprah District, West Bandung Regency". The aim of this study is to evaluate the implementation of the Family Hope Program (PKH) in Tanimulya Village, Ngamprah District, West Bandung Regency, and to assess the extent to which this program contributes to improving the welfare of the beneficiary families. The theory used in this research is the evaluation theory by William N. Dunn, which includes the dimensions of Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equity, Responsiveness, and Accuracy. This study employs a descriptive qualitative method with data collected through in-depth interviews, observations, and secondary data

analysis. The findings of the study indicate that the implementation of the Family Hope Program (PKH) in Tanimulya Village has been well executed, in line with the program's initial objectives to improve the quality of life of PKH participants by enhancing the welfare of the beneficiary families, particularly in education and healthcare. The program has also had a positive impact on increasing family participation in education and access to healthcare, although there are some challenges related to the distribution of assistance, such as the timeliness of aid disbursement and clarity of information to the beneficiaries. Overall, PKH in Tanimulya Village has been effective in achieving its goals, but improvements are needed in terms of efficiency and adequacy of aid to ensure more equitable and targeted benefits.

Keywords: Evaluation, Family Hope Program, Tanimulya Village, Family Welfare.

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah sebuah fenomena dan isu sosial yang selalu diteliti dan menjadi fokus perhatian pemerintah pusat serta pemerintah daerah. Salah satu faktor penyebab ketertinggalan dan penghambat dalam pembangunan suatu bangsa adalah karena tingginya angka kemiskinan. Kemiskinan dinilai dapat menimbulkan dampak yang bersifat menyebar (*multiplier effects*) terhadap tatanan kemasyarakatan secara menyeluruh, sehingga kemiskinan juga merupakan muara dari masalah sosial lainnya (Purwanto dkk, 2013: 80). Hal ini dikarenakan kemiskinan itu bersifat multidimensional artinya karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, kemiskinan juga memiliki banyak elemen utama seperti kurangnya aset, kelemahan dalam organisasi sosial politik, kurangnya pengetahuan, serta keterampilan. Selain itu, ada juga elemen tambahan yang mencakup kurangnya jaringan sosial, akses ke sumber daya keuangan, dan informasi. Berbagai dimensi kemiskinan ini terlihat melalui masalah seperti kekurangan gizi, akses yang terbatas terhadap air, hunian yang tidak sehat, layanan kesehatan yang kurang memadai, dan tingkat pendidikan yang rendah.

Sehubungan dengan maksud tersebut maka Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2007 telah mengeluarkan Program Keluarga Harapan (PKH), seperti yang diatur dalam Pasal 1 ayat (9) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menentukan bahwa "Perlindungan sosial

adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial". Program

Keluarga Harapan atau PKH merupakan salahsatu program perlindungan sosial di Indonesia dalam bentuk bantuan sosial. Bantuan ini diberikan kepada keluarga miskin dan rentan miskin dengan persyaratan tertentu di mana mereka terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). PKH

merupakan salahsatu upaya pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan secara khusus bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi.

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dapat menjadi solusi yang efektif dalam mengatasi kemiskinan bagi Rumah Tangga Sangat Miskin. Keikutsertaan dalam PKH tidak hanya memberikan keuntungan bagi para penerima, tetapi juga mendorong perubahan dalam pola hidup dan tingkah laku yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan, yang selanjutnya dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat di area pelaksanaan program. Dalam proses pelaksanaannya, para peserta yang memperoleh dana dari PKH akan mendapatkan bantuan selama maksimum enam tahun. Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak menerima uang bantuan serta bantuan lain, dan mereka memiliki tanggung jawab sebagai penerima manfaat PKH yang dilihat dari dua aspek, yakni kesehatan dan pendidikan. Apabila keluarga penerima manfaat PKH tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan, mereka akan dikenakan sanksi berupa pengurangan dana bantuan sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Pedoman PKH.

Pelaksanaan PKH di Desa Tanimulya merupakan sebuah solusi dari pemerintah untuk membenahi permasalahan pendidikan dan kesehatan. Pada tahun 2021 sampai 2022 tercatat sejumlah 512 KPM yang terdaftar sebagai penerima PKH. Pada tahun 2023 sampai 2024 jumlah KPM mengalami penurunan sebanyak 101 KPM. Dengan adanya bantuan PKH ini, diharapkan mendorong perubahan perilaku KPM PKH untuk memperbaiki kualitas

kesehatan dan pendidikan. Selain itu, kehadiran program ini diharapkan tidak hanya menjadi bantuan uang semata tetapi mampu memberdayakan masyarakat yang lebih mandiri dan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam upaya untuk mengevaluasi PKH secara menyeluruh, penting untuk menerapkan dimensi evaluasi yang komprehensif. Berdasarkan teori evaluasi William N. Dunn (2003), ada enam dimensi efektivitas, efisiensi, pemerataan, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan.

Fenomena masalah dalam dimensi efektivitas berkaitan dengan sejauh mana PKH berhasil mencapai tujuannya, yaitu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Tanimulya. Meskipun program ini memberikan bantuan, ada pertanyaan mengenai apakah bantuan tersebut benar-benar menghasilkan perbaikan yang signifikan dalam kualitas hidup Keluarga Penerima Manfaat Desa Tanimulya. Selain itu dimensi efisiensi mengacu pada bagaimana sumber daya yang dialokasikan untuk PKH digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Fenomena masalah yang mungkin terjadi di sini termasuk penggunaan dana yang tidak optimal atau adanya birokrasi yang memperlambat proses distribusi bantuan. Pada pemerataan menilai sejauh mana PKH menjangkau semua keluarga miskin secara adil dan merata. Masalah yang muncul dalam dimensi ini meliputi ketidakmerataan dalam distribusi bantuan, seperti wilayah atau kelompok tertentu yang mungkin tidak mendapatkan manfaat secara setara.

Pada dimensi kecukupan mengukur apakah bantuan yang diberikan oleh PKH memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar Keluarga Penerima Manfaat di Desa Tanimulya. Fenomena masalah dalam konteks ini termasuk apakah jumlah bantuan tunai cukup untuk menutupi kebutuhan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya. Selain itu, responsivitas berkaitan dengan kemampuan PKH untuk menanggapi kebutuhan dan

aspirasi Keluarga Penerima Manfaat Desa Tanimulya. Masalah yang mungkin timbul di sini adalah sejauh mana program ini dapat menyesuaikan bantuan sesuai dengan perubahan kondisi atau kebutuhan Keluarga Penerima Manfaat. Dan yang terakhir dimensi ketepatan menilai sejauh mana PKH dalam memberikan bantuan kepada masyarakat miskin di Desa Tanimulya yang benar-benar membutuhkan dan memastikan bahwa bantuan sampai ke tangan yang tepat. Fenomena masalah di sini meliputi potensi adanya penyimpangan dalam penerimaan bantuan, seperti penerima yang tidak memenuhi syarat atau masalah dalam verifikasi data. Berdasarkan pertimbangan dan kenyataan yang telah diuraikan diatas, diharapkan pemerintah dapat berperan aktif dalam menangani kemiskinan di Desa Tanimulya. Peneliti ingin mengetahui seberapa jauh kebijakan PKH tersebut sudah mampu melindungi kehidupan sosial keluarga miskin di Desa Tanimulya.

Artikel ini akan secara jelas menjelaskan PKH menjadi target evaluasi karena program tersebut sangat berkaitan dengan penyelesaian masalah kemiskinan dan menjadi program unggulan Kementerian Sosial saat ini, sehingga akan dilihat apakah kebijakan tersebut sudah sesuai dengan harapan yang diinginkan atau justru tidak terutama pada pelaksanaannya di Desa Tanimulya. Guna mendukung pencarian informasi apakah kebijakan PKH tersebut efektif ataukah belum, maka penelitian ini akan lebih mengarah pada evaluasi terhadap pencapaian tujuan kebijakan PKH dengan judul penelitian “Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.”

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian ini di pilih berdasarkan dari pertimbangan peneliti yang dapat menggambarkan secara luas dan bisa menganalisis data dan juga informasi tentang Pelaksanaan

Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. Informan meliputi Koordinator PKH Kabupaten Bandung Barat, Kepala Desa Tanimulya, Pendamping PKH Desa Tanimulya, Operator SIKS-NG, beserta 3 perwakilan peserta KPM PKH Desa Tanimulya. Teknik pengumpulan data meliputi Observasi, Wawancara, Dokumentasi dan Studi Kepustakaan. Teknik Analisis data meliputi Reduksi Data, Penyajian Data, dan Kesimpulan. Teori yang digunakan menggunakan yaitu Teori Evaluasi William N. Dunn

PEMBAHASAN

Efektivitas Pelaksanaan PKH di Desa Tanimulya

Efektivitas berkaitan langsung dengan perbandingan antara hasil yang diharapkan dan hasil yang sebenarnya tercapai. Efektivitas menurut Dunn (2003) Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Dalam konteks Program Keluarga Harapan (PKH), efektivitas pelaksanaan di Desa Tanimulya ditunjukkan melalui manfaat yang dirasakan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan wawancara dengan Koordinator PKH Kabupaten Bandung Barat, Kepala Desa, pendamping PKH, serta Operator SIKS-NG, program ini berhasil mengurangi beban ekonomi rumah tangga miskin dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Tanimulya, pelaksanaan PKH dinilai cukup efektif dengan indikator utama manfaat nyata yang dirasakan oleh penerima bantuan. Hal ini membuktikan pelaksanaan PKH di Desa Tanimulya mampu memberikan hasil yang baik dengan terbantunya peserta PKH sebanyak 411 KPM dalam mengurangi kebutuhan peserta walaupun hasil ini dirasa

masih belum signifikan mengurangi angka kemiskinan yang ada. Dengan ini dapat di katakan bahwa program PKH ini juga memberikan kontribusi dalam memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan hidup terutama dalam hal kesehatan dan pendidikan anak. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya program yang masih berjalan sampai saat ini, nantinya rumah tangga miskin yang menjadi sasaran utama dapat berkurang. Berdasarkan wawancara dengan informan KPM Desa Tanimulya, di bidang pendidikan bantuan digunakan untuk membeli perlengkapan sekolah, buku, dan memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Hal ini membantu KPM memastikan anak-anak mereka tetap bersekolah tanpa hambatan ekonomi. Di bidang kesehatan KPM dapat membawa balita mereka ke posyandu secara rutin untuk imunisasi dan pemeriksaan kesehatan.

Hal ini mengindikasikan bahwa program tersebut efektif dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 23 menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial dapat dicapai melalui program bantuan sosial, seperti PKH, untuk membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah melalui Program Keluarga Harapan ini berusaha untuk memastikan bahwa kelompok yang rentan menerima bantuan yang mereka perlukan untuk dapat meningkatkan taraf hidup, memenuhi kebutuhan dasar dengan baik, mendapatkan akses ke layanan kesehatan serta pendidikan, serta memperkuat diri agar dapat mencapai kemandirian ekonomi dan sosial dalam jangka waktu panjang.

Dalam pelaksanaannya, Pelaksanaan PKH di Desa Tanimulya telah memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Peraturan ini menetapkan mekanisme operasional, mulai dari seleksi penerima manfaat, distribusi bantuan, hingga monitoring dan evaluasi.

Adanya kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dirancang berdasarkan peraturan ini memastikan bahwa program berjalan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Efisiensi Pelaksanaan PKH di Desa Tanimulya

Kriteria efisiensi mengacu pada waktu dan proses pencairan dana PKH. Efisiensi dalam evaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Tanimulya berkaitan dengan proses pendistribusian dana bantuan PKH. Waktu dan proses pencairan dana PKH sudah efisien karena sudah dilakukan sesuai dengan jadwal yakni 4 tahapan dalam 1 tahun sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Wawancara dengan Koordinator PKH Kabupaten Bandung Barat dan pendamping PKH Desa Tanimulya menunjukkan bahwa pencairan dana berlangsung tepat waktu. Sistem ini didukung oleh pendamping yang aktif memberikan informasi kepada KPM, memastikan proses berjalan tanpa kendala. Di samping itu ada peningkatan dalam hal pelayanan pencairan yang tadinya bersifat offline melalui kantor POS yang seringkali menyebabkan antrean panjang. Namun, dengan kerja sama bank penyalur seperti BNI, BRI, dan Mandiri, pencairan kini dilakukan secara online jadi setiap KPM memiliki buku rekening dan kartu ATM, hal ini memudahkan para KPM dalam menerima bantuan langsung lewat ATM tanpa harus mengantre. Penerapan sistem baru ini tidak hanya mempercepat proses pencairan tetapi juga memastikan bantuan diterima tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran. Sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang terintegrasi dengan SIKS-NG menjadi fondasi penting dalam memastikan data penerima bantuan valid dan akurat.

Kecukupan Pelaksanaan PKH di Desa Tanimulya

Aspek kecukupan dalam pelaksanaan PKH merupakan deskripsi variable penelitian yang bersumber dari teori William N. Dunn. Kecukupan Program Keluarga Harapan (PKH) berhubungan dengan tingkat kepuasan peserta sebagai penerima program dalam

memenuhi kebutuhan mereka di bidang kesehatan dan pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar tertentu, seperti pendidikan dan kesehatan, namun tidak mencukupi untuk pengeluaran konsumsi sehari-hari hal ini bergantung pada kondisi spesifik setiap keluarga penerima manfaat (KPM) dan cara pengelolaan dana yang diterapkan. Dari perspektif penerima manfaat, beberapa tanggapan menunjukkan bahwa bantuan dirasakan tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Ibu Nengsih menyatakan bahwa bantuan PKH hanya cukup untuk sebagian kebutuhan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumsi harian, terutama untuk makanan. Hal ini diperkuat oleh Ibu Maesaroh yang secara langsung menyebutkan bahwa bantuan tidak mencukupi karena tingginya pengeluaran rumah tangga.

Berdasarkan pengamatan peneliti dan hasil wawancara, peneliti berpendapat bahwa bantuan PKH secara umum lebih efektif jika diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tertentu, seperti pendidikan dan kesehatan, Program ini terbukti mampu meringankan beban ekonomi keluarga, namun belum sepenuhnya mencukupi untuk keluarga dengan pengeluaran besar atau kebutuhan khusus. Pemerintah perlu melakukan beberapa langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas program ini:

1. Edukasi Pengelolaan Keuangan: Memberikan edukasi kepada KPM tentang cara memanfaatkan dana bantuan secara efektif untuk kebutuhan prioritas.
2. Pendampingan Ekonomi: Mengembangkan program pendampingan untuk membantu KPM menciptakan sumber pendapatan tambahan, seperti pelatihan keterampilan atau pemberdayaan usaha mikro.

Evaluasi Besaran Bantuan: Melakukan kajian terhadap besaran bantuan untuk memastikan bahwa dana yang

diberikan dapat lebih proporsional dengan kebutuhan spesifik keluarga, terutama keluarga dengan anggota balita atau lansia.

3. Perubahan Pola Pikir: Mendorong KPM untuk lebih mandiri dan tidak sepenuhnya bergantung pada bantuan pemerintah, sehingga bantuan dapat menjadi penunjang, bukan sumber utama pemenuhan kebutuhan.

Perataan Pelaksanaan PKH di Desa Tanimulya

Aspek Perataan Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tanimulya Berdasarkan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn, aspek keadilan dan kewajaran dalam distribusi manfaat program dievaluasi melalui tingkat kesejahteraan sosial, kepuasan penerima manfaat, serta akurasi distribusi bantuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi bantuan PKH di Desa Tanimulya telah berjalan dengan baik, transparan, dan sesuai standar operasional prosedur (SOP).

Data dari Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) menjadi dasar validasi penerima manfaat. Semua keluarga penerima manfaat (KPM) menerima bantuan tanpa potongan, langsung ditransfer ke rekening masing-masing. Proses verifikasi data dilakukan secara ketat mencakup kelayakan sosial-ekonomi dan administratif, memastikan bantuan tepat sasaran. Selain itu, pembaruan data secara berkala melalui aplikasi SIKS-NG memungkinkan penyesuaian nominal bantuan, terutama untuk kebutuhan pendidikan berdasarkan jenjang sekolah anak KPM di Desa Tanimulya.

Hasil wawancara dengan berbagai pihak Koordinator PKH Kabupaten Bandung Barat, Kepala Desa Tanimulya, pendamping PKH, operator SIKS- NG, dan KPM Desa Tanimulya menegaskan bahwa distribusi bantuan telah merata dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pemerintah. Tidak ditemukan kendala teknis atau keluhan dari penerima manfaat terkait jumlah bantuan yang diterima. Proses pengawasan dan koordinasi yang berkelanjutan

antara pemerintah desa, pendamping PKH, dan operator SIKS- NG turut memastikan distribusi yang akuntabel dan minim kesalahan. Program PKH di Desa Tanimulya dinilai telah berhasil mendukung kebutuhan dasar masyarakat kurang mampu, sesuai dengan tujuan utama program.

Responsivitas Pelaksanaan PKH di Desa Tanimulya

Aspek responsivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Tanimulya merupakan variabel penelitian yang bersumber dari teori William N. Dunn yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan, dan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan. Peneliti memperoleh temuan terhadap pelayanan dan kemampuan petugas dalam memberikan informasi terkait Program Keluarga Harapan (PKH). Berdasarkan wawancara dengan berbagai pihak, ditemukan bahwa sosialisasi dan pelayanan PKH di Desa Tanimulya telah dilakukan secara menyeluruh melalui berbagai mekanisme, termasuk Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), serta pertemuan langsung antara pendamping dan KPM.

Sosialisasi PKH di Desa Tanimulya dilaksanakan secara rutin setiap bulan melalui kegiatan P2K2. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Dewi Yulianti, Koordinator PKH Kabupaten Bandung Barat, yang menyebutkan bahwa pendamping aktif memberikan edukasi kepada KPM mengenai tujuan, mekanisme, dan manfaat program PKH. Edukasi ini bertujuan agar penerima memahami secara mendalam hak, kewajiban, dan prosedur pelaksanaan program. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Kepala Desa Tanimulya, Bapak Wawan Sutisna, yang menekankan pentingnya penyuluhan yang dilakukan secara langsung oleh pendamping untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat mendapatkan informasi yang diperlukan. Lebih lanjut, pendamping PKH Desa Tanimulya, Bapak Idzan, menegaskan bahwa pertemuan bulanan menjadi sarana utama untuk menyampaikan berbagai informasi penting terkait PKH. Dalam sesi ini, pendamping memberikan penjelasan

mengenai mekanisme pencairan dana, tujuan program, serta peran aktif KPM dalam mendukung keberhasilan PKH. Pernyataan ini diperkuat oleh Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), Ibu Imas Marpuah, yang menjelaskan bahwa P2K2 atau FDS bersifat wajib bagi KPM.

Kegiatan ini bertujuan tidak hanya untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk membangun keluarga yang mandiri dan sejahtera melalui edukasi. Namun, meskipun sosialisasi dilakukan secara rutin, terdapat hambatan berupa ketidakhadiran beberapa KPM dalam pertemuan bulanan. Hal ini diungkapkan oleh salah satu KPM, Ibu Jua, yang menyebutkan bahwa ada peserta yang kurang memahami informasi karena jarang hadir. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam metode sosialisasi untuk menjangkau KPM yang tidak dapat menghadiri pertemuan rutin.

Dilain pihak, pelayanan yang diberikan oleh pendamping PKH di Desa Tanimulya dinilai responsif dan memuaskan oleh mayoritas KPM. Koordinator PKH Kabupaten Bandung Barat, Bapak Dana Saputra, menyatakan bahwa tim selalu berupaya memberikan pelayanan terbaik, termasuk membuka ruang konsultasi bagi KPM yang membutuhkan informasi lebih lanjut. Pernyataan ini sejalan dengan laporan Kepala Desa Tanimulya yang menyebutkan bahwa pendamping PKH selalu bekerja secara amanah dan memastikan program berjalan lancar.

KPM juga memberikan apresiasi terhadap pelayanan pendamping yang dinilai cepat tanggap, ramah, dan edukatif. Misalnya, Ibu Nengsih, salah satu KPM, menceritakan pengalamannya saat menghadapi kendala teknis berupa kartu yang terblokir. Dalam situasi tersebut, pendamping dengan sigap memberikan arahan untuk segera menyelesaikan masalah tersebut di kantor desa. Responsivitas program keluarga harapan merupakan bentuk respon peserta program keluarga harapan yang timbul akibat kepuasan mereka terhadap pelaksanaan PKH. Hal itu terbukti dari respon para peserta keluarga harapan yang

merasa puas dengan adanya program ini.

Ketepatan Pelaksanaan PKH di Desa Tanimulya

Aspek Ketepatan merupakan variabel yang bersumber dari teori William N. Dunn merujuk pada pentingnya nilai atau manfaat yang terkandung dalam tujuan program, serta kekuatan asumsi yang mendasari tujuan-tujuan tersebut. Dengan kata lain, teori ini menekankan bagaimana nilai dari tujuan program diukur dan sejauh mana asumsi-asumsi yang mendasari perumusan tujuan tersebut berpengaruh terhadap keberhasilan program. Kriteria ketepatan ini memiliki pertanyaan pokok berupa bagaimana Program Keluarga Harapan yang ditujukan kepada Keluarga Penerima Manfaat di Desa Tanimulya apakah dalam pelaksanaannya dari awal sampai saat ini sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dilapangan dengan berbagai informan, Peneliti dapat simpulkan bahwa Program Keluarga Harapan di Desa Tanimulya menunjukkan tingkat ketepatan yang tinggi dalam memenuhi kebutuhan KPM. Sosialisasi melalui pertemuan rutin dan komunikasi aktif antara pendamping dan KPM menjadi kunci keberhasilan program ini. Para KPM merasa mendapatkan manfaat nyata, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, tidak ditemukan kendala berarti dalam pelaksanaan program, termasuk dalam hal pencairan dana dan distribusi bantuan yang tepat waktu dan tepat sasaran.

Upaya pemerintah dalam memastikan ketepatan program ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Misalnya, dengan memberikan pelatihan tambahan bagi pendamping untuk memperkuat kemampuan komunikasi dan manajemen konflik. Dengan demikian, Program Keluarga Harapan di Desa Tanimulya dapat terus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat di dalam penelitian ini dikategorikan telah berhasil hal ini diukur melalui teori dari William N. Dunn dengan enam dimensi yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, Ketepatan,

Program ini efektif dalam memberikan manfaat bagi KPM, efisien dalam pengelolaan dan distribusi bantuan, mencukupi untuk kebutuhan dasar, merata dalam penerimaan manfaat, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta tepat sasaran sesuai dengan tujuan program. Namun perlu ditingkatkan kembali untuk keberhasilan program, perlu dilakukan:

Peninjauan kembali besaran bantuan agar lebih sesuai dengan kebutuhan aktual KPM.

Penguatan pelatihan bagi pendamping untuk meningkatkan kualitas layanan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agustino, Leo. (2006). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta.
- Alam, S. A. ((2012:25) (Ed)). Studi Kebijakan Pemerintahan (cet.1). Bandung: Refika Aditama.
- Anggara, S. (2014). Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia.
- Arikunto, S. (2010). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dermoredjo, P. S. (2003). Produksi Domestik Bruto, Harga dan Kemiskinan: Hipotesis “Trickle Down” Dikaji Ulang. *Economics and Finance in Indonesia*, 291-324.
- Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gomes, F. (2003). Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Andi. Hasibuan, M. S. (2006). Menejemen Dasar, Pengertian dan Masalah. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Herabudin. (2016). Studi Kebijakan Pemerintah. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Makmur. (2011). Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung: Refika Amalia.

- Moleong, L. J. (2008). Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mustrose, H. (2012). Kebijakan Publik. Semarang: Widya Karya.
- Nugroho, R. (2004). Public Policy. Jakarta: Elex Media Kompetindo.
- Siagian, S. P. (2004). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sobirin, U. (2017). Kebijakan Publik. Makassar: CV SAH MEDIA.
- Subarsono. (2015). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2008). Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Tayibnapis, Y. F. (2008). Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Winarno. (2014). Kebijakan Publik. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Wiratna Sujarweni, V. (2014). Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru

SKRIPSI

- Azzahrah, S. (2021). Implementasi Program Keluarga Harapan Di Desa Salukanan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Graha, S. A. (2017). Evaluasi Peraturan Daerah Kota Bandung No. 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Studi Kasus Pemberdayaan Jam Operasional Hiburan Malam Di Kota Bandung). Skripsi. Cimahi: Unjani.
- N. Wulandari. (2021). Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin. Makassar

Nurfazlina. (2020). Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Skripsi. Pekanbaru: UIN SUSKA RIAU.

DOKUMEN DAN PERUNDANG – UNDANGAN

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2009) “Langkah Teknis Penyusunan Program Dan Kegiatan”, Penyusunan Program Dan Kegiatan. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, pp. 1 – 69

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, No: 31/Kep/MENKO/- KESRA/IX/2007 tentang “Tim Pengendali Program Keluarga Harapan”.

Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2021- 2024. (n.d.). Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2021- 2024 (p. 22).

Peraturan Menteri Sosial No. 10 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).

Saleh, A. M., Priyono, & Subkhan, N. U. (2023). Kecamatan Ngamprah dalam Angka 2023 (p. 128). BPS Kabupaten Bandung Barat. Retrieved from <https://bandungbaratkab.bps.go.id/publication.html?page=2>

Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial